

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia. Masalah tersebut sangat berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia diantaranya fisik, psikis, sosial, spiritual, dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kemampuan perekonomian mereka yang sangat terbatas. Ketidaktahuan tentang bagaimana yang disebut sebagai rumah layak huni, sehingga masyarakat miskin menganggap bahwa rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, mental, dan sosial. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan bantuan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak, terjangkau sehat, aman, harmonis, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Rizky, 2018).

Untuk mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Instansi/lembaga pemerintah mengutuskan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan sebuah program yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bidang infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Program ini menjadi salah satu program unggulan kementerian PUPR, yang memang ditugaskan Presiden untuk menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) (Tama, 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pasal 38 ayat (2) tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemamfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Berdasarkan Panduan Pembekalan Fasilitator BSPS TA 2022, rumah adalah kebutuhan dasar manusia dengan fungsi yang strategis sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berikut yang menjadi syarat bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS):

1. WNI yang sudah berkeluarga (penghuni yang terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun.
2. memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah seperti Sertifikat, Akta Tanah, Akta Jual Beli, Nib, Izin Kepala Adat atau bukti lainnya yang sah.
3. Berpenghasilan maksimal sebesar UMP atau UMK
4. Memiliki & menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan telah dimiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun.

5. Belum pernah memperoleh BSPS/bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan UU.
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng

Bantuan yang diberikan pada program BSPS adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah/memperluas rumah untuk meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni. Pada tahun 2022 program tersebut telah disalurkan sebanyak 17.150 unit rumah di Provinsi Aceh yang tersebar pada 13 kabupaten/kota melalui program rumah pemberdaya masyarakat (RPM) sebanyak 16.647 dan *Program National Affordable Housing Program (NAHP)* sebanyak 503 unit (Kementerian PUPR, 2023).

Anggaran dari program BSPS di tahun 2022 mencapai Rp343 miliar untuk setiap kota di Aceh, dengan anggaran sebesar Rp20 juta per unit rumah yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan material dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja. Kabupaten Bireuen merupakan Salah satu kabupaten penerima terbanyak program BSPS sebanyak 7505 unit rumah. Pada TA 2023 program BSPS di provinsi Aceh dibangun sebanyak 250 unit dengan anggaran mencapai Rp125 miliar yang terbagi di beberapa Kabupaten, dan Kecamatan (Kementerian PUPR, 2023).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis, *Gampong Samuti Makmur* merupakan salah satu Gampong yang diselenggarakan program BSPS dari kecamatan Gandapura. *Geuchik* dan Perangkat *Gampong* bekerjasama mengusulkan beberapa rumah yang termasuk kedalam kriteria rumah tidak layak huni untuk mendapatkan perbaikan rumah melalui Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahap pertama yang diusulkan pada tahun 2022 sebanyak 20 unit rumah yang lulus seleksi sebagai penerima program di TA 2022. Pada Tahun 2023 *Keuchik* beserta Perangkat *Gampong* mengusulkan kembali program Program bantuan BSPS sebanyak 85 unit rumah yang didata untuk diseleksi lagi kelayakan sebagai calon penerima bantuan. Dari proses seleksi tersebut sebanyak 20 unit rumah yang layak ditetapkan menjadi penerima bantuan. Maka di *Gampong* Samuti Makmur sebanyak 40 unit rumah sebagai penerima bantuan sudah selesai diperbaiki (Wawancara dengan Perangkat *gampong* 18 Juni 2023).

Tabel 1. 1 Daftar Nama Gampong Penerima Program BSPS Kecamatan Gandapura

No	Nama Gampong program BSPS	Jumlah unit	Tahun
1	Monkeulayu	22	2022&2023
2	Monjambe	30	2022&2023
3	Cot tunong	59	2022&2023
4	Paya kareung	13	2023
5	Blang guron	13	2023
6	Samuti makmur	40	2022&2023
7	Cot mane	29	2022&2023
8	Dama kawan	10	2023
9	Pante sikumbong	10	2023
10	Samuti krueng	56	2022
11	Lapang barat	10	2022
12	Alue mangki	25	2022
13	Ujong bayu	10	2022
14	Paloh mee	23	2022
15	Cot jabet	44	2022
16	Paya kareung	4	2022
17	Cot tufah	33	2022
18	Blangkeude	20	2022
19	Blangkubu	20	2022
20	Blangrheue	25	2022
21	Cot Teube	18	2022
22	Lhok mambang	24	2022
23	Paya seupat	10	2022
24	Samuti aman	20	2022
25	Samuti rayeuk	20	2022
26	Keude lapang	20	2022

Sumber: Fasilitator pemberdayaan program BSPS Kecamatan Gandapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator lapangan program BSPS di *Gampong Samuti Makmur*, tujuan dari program bantuan tersebut untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan keswadayaan agar memiliki akses dalam memenuhi rumah layak huni secara swadaya. Tingkat keberhasilan Program BSPS ini sangat ditentukan oleh sejauhmana program tersebut mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Mulai dari awal kegiatan pembangunan khususnya pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil program BSPS. Semakin besar tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar pula tingkat keberhasilannya dan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dalam proses pelaksanaan program tersebut, pemerintah hanya memfasilitasi, mengawasi, tanpa harus terjun langsung ke dalam lingkup masyarakat (Wawancara dengan Fasilitator Pemberdayaan BSPS, 04 juli 2023).

Rumah dalam konsep BSPS adalah rumah layak huni, terjangkau yang dibangun menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana dan memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Program BSPS mengharapkan partisipasi dari masyarakat secara gotong royong dalam proses pengerjaan perbaikan rumah bantuan, dengan adanya partisipasi mampu untuk mengurangi biaya pengeluaran upah tukang dan mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun masih ada juga masyarakat yang kurang mengerti tentang konsep dari swadaya yang dimaksud sehingga membuat masyarakat penerima Program BSPS kesulitan dalam proses pengerjaan perbaikan rumah. Oleh sebab itu masyarakat merasa bahwa dana yang disalurkan tidak

cukup sehingga memakan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya karena terkendala (Wawancara dengan Fasilitator Pemberdayaan BSPS, 04 juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap beberapa penerima bantuan. Bahwa mereka sangat antusias dengan adanya program BPS, kerena mampu membantu mereka memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah mereka agar menjadi rumah layak huni (RLH). Namun sebagian dari penerima program Bantuan BPS di *Gampong Samuti Makmur* mengalami kendala mulai dari faktor biaya, tenaga, keahlian dalam membangun rumah dan juga pengetahuan terhadap program Bantuan BPS.

Adanya penambahan biaya ketika saat sedang dilakukan renovasi karena kondisi rumah yang rusak parah dan juga ada yang merenovasi seluruhnya rumahnya dengan istilah bangun baru, sehingga bahan material yang telah disalurkan tidak cukup dan biaya upah tukang perlu ditambah. Akibatnya masyarakat penerima bantuan berupaya menambahkan dana dengan berbagai cara guna untuk bisa menambahkan biaya. Maka dari itu adanya kendala dalam proses perbaikan rumah yang berlangsung lama tidak sesuai dengan maksimal waktu yang telah ditentukan. Kendala tersebut akibat dari kurangnya pengetahuan tentang program bantuan BPS serta kurang memberlakukan konsep swadaya/partisipasi dalam proses pengerjaan memperbaiki rumah maka sebagian masyarakat perlu banyak menambahkan biaya serta proses perbaikan berlangsung lama dan tidak tepat waktu (Wawancara awal, 20 juni 2023).

Berdasarkan realitas diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program bantuan BPS yang berlangsung di *Gampong Samuti Makmur*

dengan judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di *Gampong Samuti Makmur*”**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. ***Bagaimana bentuk*** partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di *Gampong Samuti Makmur* ?
2. Apa kendala masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di *Gampong Samuti Makmur* ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji partisipasi masyarakat dan kendala masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di *Gampong Samuti Makmur*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. ***Mengetahui bentuk*** partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di *Gampong Samuti Makmur*.
2. ***Mengetahui kendala*** masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di *Gampong Samuti Makmur*

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dapat berupa manfaat praktis dan manfaat teoritis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang penulis laksanakan di harapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang partisipasi masyarakat.
- b. Memperkuat wawasan agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya dibidang ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu Sosiologi terkait dengan program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta hasil dari penelitian ini juga untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat memperoleh gelar serta dapat dijadikan bahan untuk perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa Tentang partisipasi masyarakat dalam program BSPS.